

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen obyek wisata pada dasarnya adalah manajemen yang berkaitan dengan bagaimana memuaskan konsumen atau memberikan pengalaman yang berkualitas. Karena wisatawan yang tidak puas mungkin tidak akan datang lagi ke suatu destinasi, tidak berkunjung atau memberikan rekomendasi yang negatif kepada orang-orang terdekatnya. Hal ini dapat menjadi promosi dari mulut ke mulut yang negatif (*negative words of mouth*).¹

Pengembangan pariwisata tanpa perencanaan yang baik akan banyak menemui hambatan atau kegagalan, terutama konflik yang terjadi antara pemerintah dan masyarakat (pengelola) karena adanya perbedaan visi dan misi pengembangan pariwisata itu sendiri. “Oleh karena itu mempersamakan pemahaman atau menyamakan persepsi merupakan jalan yang terbaik untuk mempertemukan tiga kepentingan dalam pengelolaan pariwisata (destinasi obyek wisata) yaitu pengunjung, pengelola (masyarakat) dan pemerintah.”²

Salah satu obyek wisata yang berada di Sulawesi Tenggara yaitu pantai Toronipa merupakan salah satu destinasi pariwisata yang sering dikunjungi oleh masyarakat terutama masyarakat dari kota Kendari. Obyek wisata Toronipa

¹ Fahrni Noval, “Efektivitas Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Kota Surakarta (Penelitian Deskriptif Tentang Efektivitas Dinas Pariwisata Dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Kota Surakarta.” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2001). h 40

² Yoeti A Oka, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. (Jakarta:Pradnya Paramita, 1997) h 21

berdasarkan berbagai hasil penelitian sangat dikenal karena promosi dari mulut ke mulutnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mencoba mengaplikasikan teori komunikasi yang dikaitkan dengan pariwisata dan pemasaran yang lebih dikenal dengan *marketing communication*.³ Namun disisi lain dalam pengelolaan obyek wisata pantai Toronipa ini masih dikelola oleh masyarakat secara pribadi berdasarkan hak milik lahan oleh orang-orang yang memiliki lahan daerah pariwisata tersebut.

Pengembangan objek wisata pantai Toronipa muncul dari adanya model pengelolaan obyek wisata yang disinyalir banyak memberikan dampak negatif dibandingkan dampak positif, terutama terjadinya kerusakan lingkungan, persaingan antara masing-masing pemilik lahan, sehingga muncul konsep pembangunan obyek wisata yang dapat mengurangi dampak positif, namun meningkatkan dampak negtifnya.

Pada kesempatan peneliti mencoba memahami manajemen dalam pengelolaan obyek wisata pantai Toronipa guna menjembatani kepentingan wisatawan, masyarakat dan juga pemerintah terutama dalam pengembangan suatu model pengelolaan daya tarik wisata yang berkualitas dan memberikan manfaat secara terus menerus kepada semua pihak. Hal ini juga didasarkan pada permasalahan rencana kurangnya komunikasi, musyawarah, dan masalah lainnya yang mengakibatkan adanya perselisihan antara pengelola dan pemilik lahan pada obyek wisata yang ada di Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia yang menimbulkan beberapa tanggapan negatif, terutama dari Pengelola objek wisata, masyarakat, serta pemerintah.

³ Achlis, *Masyarakat dan Kebudayaan*. (Bandung: STKS 1998). H 9

Untuk mengetahui pengelolaan suatu destinasi wisata maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul *Manajemen Obyek Wisata Pantai Toronipa Ditinjau Dari perspektif Ekonomi Syariah*. Selain itu penulis berusaha memberikan pemahaman tentang bagaimana mengelola suatu destinasi yang berkualitas kepada semua pemangku kepentingan; pemerintah, pengelola PAD (Pendapatan Asli Daerah), pemilik lahan agar tidak terjadi perselisihan yang akan diberikan pemahaman secara agama. Untuk itu manajemen yang baik adalah salah satu menjadi pertimbangan wisatawan dalam memutuskan untuk berwisata dengan nyaman serta fasilitas yang memadai.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, serta untuk memudahkan perolehan, pengkajian, dan penyajian data, maka fokus dalam penelitian ini adalah manajemen obyek wisata pantai Toronipa ditinjau dari perspektif Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah untuk menggambarkan manajemen obyek wisata pantai Toronipa di atas maka peneliti menguraikannya menjadi beberapa bagian, diantaranya:

1. Bagaimana manajemen obyek wisata pantai Toronipa Kelurahan Toronipa?

2. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen obyek wisata pantai Toronipa ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui manajemen obyek wisata pantai Toronipa.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap manajemen obyek wisata pantai Toronipa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan terkait dengan teori- teori atau konsep dalam manajemen obyek wisata pantai Toronipa khususnya terkait dengan pendapatan ekonomi masyarakat kelurahan Toronipa yang berdagang atau berjualan diarea obyek wisata pantai Toronipa yang akan ditinjau melalui perspektif Ekonomi Syariah.

- 2) Sebagai sumber referensi bagi peneliti yang relevan lainnya.

b. Manfaat praktis

- 1) Pengelola pantai

Diharapkan para pengelola pantai Toronipa dapat meningkatkan potensi yang ada pada obyek wisata pantai Toronipa terutama dari segi pelayanan, fasisilitas yang disediakan baik yang disediakan

oleh pengelola maupun pemilik lahan. Serta membentuk kerja sama yang baik dalam proses meningkatkan pengembangan pembangunan infrastruktur obyek wisata pantai Toronipa.

2) Pemilik lahan

Dengan adanya obyek wisata pantai Toronipa yang banyak mendapat kunjungan oleh wisatawan untuk sekedar menghilangkan kepenatan pekerjaan dan liburan keluarga, maka diharapkan pemilik lahan yang berjualan dalam menetapkan harga dan memberikan fasilitas layanan sesuai dengan prinsip-prinsip penjualan yang sesuai dengan ajaran Islam.

D. Definisi Oprasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda dari kalangan pembaca dalam memahami tujuan penulis maka sesuai dengan judul skripsi ini, ada beberapa pengertian yang dikemukakan yakni sebagai berikut:

1. Obyek wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata para wisatawan yang ingin memanjakan diri dengan panorama obyek wisata pantai Toronipa yang disertai dengan fasilitas yang cukup memadai.
2. Manajemen wisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang beberapa wisata yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pengembangan pariwisata.
3. Manajemen obyek wisata adalah suatu tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan salah satu wisata untuk

mencapai tujuan yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya dalam bidang pariwisata

4. Manajemen dalam perspektif Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam mengelola objek wisata pengawasan maupun pengelola melakukan dengan baik tanpa ada interpretensi dari pihak-pihak yang merugikan sehingga menimbulkan kerugian sehingga pengelolaan sering terjadi percekcoan antara pemilik lahan atau pengelola obyek wisata pantai Toronipa Kelurahan Toronipa Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dalam penelitian ini dibahas tentang manajemen obyek wisata Pantai Toronipa ditinjau dari prespektif ekonomi syariah, adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini yaitu, Penelitian yang dilakukan oleh Mifta Damai Rianingsih tentang Strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Konawe, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Konawe. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana subjek penelitian ini yaitu kepala Bidang Pengembangan Pariwisata Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga, tokoh masyarakat pantai pesisir Batu Gong, Pantai Toronipa, Pantai Samudera, Permandian Air Nesowi Latoma, Pulau Bokori, Wisata Alam Abuki.¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan daerah pesisir di Kabupaten Konawe dimulai dengan menentukan prioritas pengembangan pantai. Dari beberapa wisata yang ada di Kabupaten Konawe beberapa pengelolaannya dengan berdasarkan tiga pilar yakni pilar *good Governance* yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Konsep ideal tersebut ternyata belum optimal akibat permasalahan yang timbul. Pengembangan daerah pesisir pantai diharapkan dapat memberikan pendapatan asli daerah yang optimal,

¹ Mifta Damai Rayaningsih, "Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Konawe." (Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi Universitas Haluoleo, Kendari, 2014), h 50